

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Negara Indonesia sudah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjang untuk menyelesaikan sengketa *Business to Business* baik secara konvensional maupun nonkonvensional, dalam hal ini melalui kerangka kolaboratif *Online Dispute Resolution* oleh APEC, dalam hal mengatasi sengketa bernilai kecil, untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Namun, peraturan yang secara langsung mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara elektronik baru ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan perundang-undangan lain masih belum mengatur mengenai hal tersebut secara pasti. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih belum siap dalam mengadopsi *APEC Collaborative Framework on ODR*.

#### **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran atas penelitian yang dilakukan:

1. Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan perdagangan melalui sistem elektronik agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perekonomian masyarakat Indonesia, agar tetap berperan untuk memberikan kepastian hukum.

2. Perlunya dilakukan pembentukan peraturan perundang-undangan apabila ingin mengadopsi kerangka *Collaborative Framework* APEC, demi terwujudnya kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.
- Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Universitas Udayana, Bali.
- Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenada Media Group, Depok.
- Lucille M. Ponte, 2005, *Online Dispute Resolution (ODR) for E-commerce*, Pearson/Prentice Hall.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mochamad Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Edisi Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Muhammad Faiz Aziz, dkk, 2021, “*Kajian APEC Collaborative Framework on ODR di Indonesia*”, Paper, Pusat Studi dan Kajian Hukum Indonesia.
- Pablo Cortes, 2011, *Online Dispute Resolution for Consumers in the European Union*, Routledge, Abingdon.
- Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi, Arbitrase*, Galia Indonesia, Bogor.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar RI tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Statuta Mahkamah Internasional

### **Jurnal Hukum**

Budya Pryanto Putra & Aleknaek Martua Nababan, 2019, “*Optimalisasi Investasi Untuk Negara Anggota Apec (Kajian Ekonomi & Tantangan Dpmpstsp-Dki Jakarta)*”, *MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol 1 No 2 (2019) : 73-83.

Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-commerce)*”, *Business Law Review*, Volume One, Business Law Community FH UII.

Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, “*Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Legal Reform by The Supreme Court of Indonesia Facing the Legal Vacuum in Civil Procedure Law)*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Mahkamah Agung RI.

Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah, 2020, “*Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-commerce*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 9 No. 2, Media Pembinaan Hukum Nasional.

Ruben Denny Djari, 2020, “*Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak*”, *Jurnal Education and development*, Vol.8 No.1 Edisi Februari 2020, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.

Veriena J. B. Rehatta, 2016, “*Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran*”, *Jurnal SASI*, Vol.22 No.1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

## Artikel/Makalah

Asia-Pacific Economic Cooperation, 2019, *APEC Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross-Border Business-to-Business Disputes – Endorsed*, Puerto Varas.

Asia-Pacific Economic Cooperation, 2019, *APEC Collaborative Framework for Online Dispute Resolution of Cross-Border Business-to-Business Disputes – Endorsed*, 2019/SOM3/EC/022.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik, [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_rpp\\_transaksi\\_elektronik.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_rpp_transaksi_elektronik.pdf)

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Hukum Dagang, [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_tentang\\_hukum\\_dagang.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hukum_dagang.pdf).

## Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata “Otomatisasi” <https://kbbi.web.id/otomatisasi>.

## Internet

ASH, *Perma Mediasi 2016 Tekankan pada Iktikad Baik*, 2016, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik/>.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, *Brief Perundingan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi>.

Google Temasek, *e-Conomy SEA 2019, Swipe Up and to the right: Southeast Asia \$100 billion Internet economy*, <https://bit.ly/3wLz7Eh>.

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!>.

Simon Kemp, *Digital 2020: Indonesia*, 18 Februari 2020, <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>.

Simon Kemp, *Digital 2021: Indonesia*, 11 Februari 2021,  
<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia?rq=Indonesia>.

Theresa Mulineaux, *Online Dispute Resolution: Companies Implementing ODR*,  
<https://libraryguides.missouri.edu/c.php?g=557240&p=3832247>.

